

Diskursus Pendidikan Islam Transformatif dalam Konteks Pendidikan Islam Nusantara

Faizal Arifin¹, Mudzakkir Ali², Muh. Syaifudin³

^{1,2,3} Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang, Indonesia

E-mail: ¹1finaferdaarinfainfaiz@gmail.com, ²mudzakkirali@unwahas.ac.id, ³syaifudin@unwahas.ac.id

Corresponding Author: Faizal Arifin, finaferdaarinfainfaiz@gmail.com (+ 62 813-9123-9779)

Published: February, 2026

ABSTRAK

Artikel ini membahas pendidikan Islam transformatif sebagai bagian integral dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia yang religius, mandiri, dan adaptif. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Pendidikan Agama Islam di Indonesia mencakup lembaga pendidikan, mata pelajaran, dan sistem nilai yang membentuk relasi teologis (*ḥabl min Allāh*), sosial (*ḥabl min al-rīḥ*), dan ekologis (*ḥabl min al-ʿālam*), sebagaimana ditunjukkan dalam tradisi pesantren yang menekankan pendidikan sebagai proses pembebasan dan humanisasi melalui internalisasi nilai-nilai luhur dalam relasi kyai dan santri yang berlangsung secara intens dan berkesinambungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif model Bogdan dan Taylor untuk memahami makna dan dinamika pendidikan Islam transformatif dalam konteks sosio-kultural Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam transformatif dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis peserta didik dan membentuk insan *kāmil* yang siap menjalankan peran kekhalifahan (*khalīfah Allāh fī ʿālam*). Dalam menghadapi tantangan zaman, pendidikan Islam dituntut untuk membuka diri terhadap dinamika zaman dan arus globalisasi, dengan menekankan prinsip *taʿallum* (pencarian ilmu secara serius) dan *tafakkur* (refleksi kritis) secara holistik.

Keywords: Islam Nusantara, Islamic education, pesantren, national character, social transformation.

ABSTRACT

This article explores transformative Islamic education as an integral component in shaping the character of the Indonesian nation to be religious, independent, and adaptive. With the largest Muslim population in the world, Islamic Religious Education in Indonesia encompasses educational institutions, school subjects, and a value system that shapes theological (*ḥabl min Allāh*), social (*ḥabl min al-rīḥ*), and ecological (*ḥabl min al-ʿālam*) relationships, as reflected in the pesantren tradition, which views education as a process of liberation and humanization through the internalization of noble values within the continuous and intensive kyai-santri relationship.

This study employs a qualitative-descriptive approach based on the Bogdan and Taylor model to understand the meaning and dynamics of transformative Islamic education within the socio-cultural context of the Indonesian archipelago. The findings indicate that transformative Islamic education aims to foster students' critical consciousness and shape the *insan kāmil*, a holistic human being prepared to fulfill the role of God's vicegerent (*khalīfah Allāh fī ʿālam*). In facing contemporary challenges, Islamic education must open itself to the dynamics of the times and globalization, emphasizing the holistic principles of *taʿallum* (serious pursuit of knowledge) and *tafakkur* (critical reflection).

Keywords: Islam Nusantara, Islamic education, pesantren, national character, social transformation.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam membentuk dan membangun karakter masyarakat Indonesia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Dalam sistem pendidikan nasional, PAI memiliki tiga bentuk, yaitu sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran wajib, dan sebagai nilai yang terinternalisasi dalam sistem pendidikan. Esensinya mencakup tiga relasi utama, yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*), hubungan antar sesama manusia (*ḥabl min al-rīḥ*), dan hubungan manusia dengan lingkungan (*ḥabl min al-ʿālam*), yang mencerminkan

pengabdian, kemanusiaan, dan keberlanjutan ekologi (Umairah, 2023:139-40). Dalam perspektif pesantren, pendidikan Islam merupakan proses bimbingan yang terarah dan berkelanjutan dari seorang kiai (guru) kepada santri (murid), dengan tujuan membentuk kedewasaan, kemandirian, serta membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan (Wahid, 2010:237). Pendidikan dipandang sebagai gerakan kultural yang mendorong transformasi sosial, bukan sebagai alat penyeragaman cara berpikir atau mencetak individu yang patuh. Dalam perspektif ini, pendidikan menjadi sarana pembebasan dan humanisasi. Oleh karenanya, pendidikan Islam tidak cukup hanya berfokus pada penguasaan ilmu agama (tafaqquh fī al-dīn), tetapi juga harus membentuk cara pandang dan perilaku hidup peserta didik ketika kembali ke masyarakat. Pendidikan Islam dituntut untuk tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman nyata yang membekali peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari (Sholikhah dkk., 2023:195).

Pendidikan merupakan proses berkelanjutan sepanjang hayat, yang tidak hanya berhenti pada proses memiliki pengetahuan (*being*), melainkan harus mendorong peserta didik untuk menjadi pribadi yang aktif dan mandiri dalam mengeksplorasi ilmu (*becoming*), demi transformasi masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan Islam merupakan proses pembinaan yang komprehensif dan terus-menerus, yang bertujuan membentuk manusia seutuhnya serta mengarahkan peserta didik agar berkembang secara optimal dalam aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial kehidupannya (Rohani, 2015:44-45). Dalam kerangka ini, pendidikan Islam adalah usaha sistematis untuk membentuk cara berpikir, membina akhlak, serta mengantar manusia menuju kematangan spiritual dan sosial sesuai dengan misi kekhalifahan dan tujuan kebahagiaan hidup di dunia-akhirat (*sa'ādah al-ālain*).

Potensi dasar ajaran Islam terletak pada sifatnya yang terbuka (inklusif) terhadap dinamika ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan Islam dituntut untuk melakukan rekonstruksi sistematis dan membangun orientasi ilmiah yang responsif terhadap perubahan sosial. Dalam kerangka ini, perlu dikembangkan dua pilar penting yaitu *ta'allum* dan *tafakkur*. *Ta'allum* mencerminkan keseriusan dalam menuntut ilmu secara benar, sementara *tafakkur* mengedepankan refleksi kritis atas esensi, manfaat, dan arah tujuan ilmu tersebut. Sinergi antara keduanya menjadi landasan utama dalam membentuk peradaban Islam yang kosmopolit, sebagaimana pernah ditunjukkan oleh para ilmuwan Muslim klasik yang mampu mengintegrasikan berbagai tradisi keilmuan demi kemajuan umat (A'la, 2006:36). Pendidikan Islam transformatif di Indonesia hadir sebagai jawaban atas tuntutan zaman, yang menuntut sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek spiritualitas semata, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tantangan global. Pendekatan ini menekankan pentingnya membentuk peserta didik yang tidak hanya religius secara pribadi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi aktif dalam proses transformasi sosial dan pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Paper ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang diorientasikan untuk memahami dunia makna subjek penelitian secara mendalam dan pembentukan teori substantif berdasar pada konsep-konsep yang muncul dari data empiris (Muhadjir, 2000:10). Sumber data primer diperoleh dari buku-buku dan artikel jurnal yang secara langsung membahas tema studi, yaitu pendidikan Islam transformatif. Adapun data sekunder bersumber dari data dukung yang relevan dengan topik pembahasan. Instrumen penelitian meliputi proses pengumpulan data, identifikasi data, serta analisis data dengan mengacu model penelitian diskriptif kualitatif Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2011:3).

Oleh karenanya, penelitian ini bermaksud menghasilkan data dan narasi deskriptif untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) Bagaimana pendidikan Islam di Indonesia dalam lintas sejarah? (2) Apa tantangan dan peluang pengembangan pendidikan Islam transformatif di Indonesia?, dan; (3) Sejauh mana urgensi pendidikan Islam transformatif di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintas Sejarah

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang sarat tantangan sekaligus inovasi dalam merespons perubahan zaman. Pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan karakter transformatif yang tidak hanya mempertahankan identitas keislaman, tetapi juga berperan aktif dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal melalui proses pendidikan yang terus berkembang. Pada tahap awal, pendidikan Islam berlangsung secara nonformal dan kontekstual dengan realitas sosial masyarakat (Yahdi, 2023:65). Penyebarannya terjadi melalui interaksi sosial, seperti perdagangan dan pernikahan, yang turut menyebarkan nilai-nilai Islam dan membentuk karakter masyarakat secara bertahap. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung relatif lancar berkat pendekatan para ulama yang mengadaptasikan ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks budaya lokal, sehingga lebih mudah diterima masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya pendidikan yang dinamis dan fleksibel terhadap perubahan zaman serta perkembangan peradaban (Supardi, 2021:vi).

Tradisi pesantren menjadi representasi konkret keberhasilan pendidikan Islam dalam menjaga kesinambungan sosial di Indonesia. Melalui sistem pendidikan yang diwariskan secara turun-temurun dan berakar pada kearifan lokal, pesantren berhasil menginternalisasikan nilai-nilai keislaman secara kontekstual dan sesuai dengan realitas masyarakat lokal (Dhofier, 2009). Keistimewaan pendidikan Islam di Indonesia terletak pada kemampuannya merespons dinamika zaman tanpa meninggalkan akar tradisi. Kemampuan ini tercermin dari fleksibilitasnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan budaya lokal yang telah mengakar. Adaptasi ini bukan pada dimensi doktrinal Islam (usūlīyah), tetapi pada praktik keberagamaan sehari-hari, yang dibentuk oleh pendekatan damai dan akulturatif dari para penyebar Islam di Nusantara (Rohani, 2018:10).

Pendidikan Islam Nusantara merupakan hasil sintesis kreatif antara ajaran Islam dan nilai-nilai lokal, menjadikannya tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai pilar yang memengaruhi struktur sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan masyarakat (Shidiq, 2020:32). Tidak seperti model pendidikan Islam di Timur Tengah atau Eropa yang lebih struktural dan formalistik, pendidikan Islam di Indonesia tumbuh secara organik, mengakar dalam kebutuhan dan realitas masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak sekadar bertahan, melainkan terus berkembang sebagai kekuatan peradaban yang inklusif dan responsif terhadap konteks zamannya. Ada tiga periode utama yang menandai perkembangan dan transformasi pendidikan Islam di Indonesia:

1). Masa Pra-Kolonial (Abad ke-7 hingga Abad ke-19)

Para sejarawan berbeda pendapat tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Menurut HAMKA, Islam telah masuk ke wilayah Melayu, termasuk Nusantara, sejak abad pertama Hijriah (abad ke-7 M). Hal ini didukung oleh catatan Tiongkok tahun 625 M yang menunjukkan keberadaan komunitas Arab di Barus, pantai barat Sumatera, pada masa Kerajaan Sriwijaya. Artinya, proses islamisasi di Nusantara telah dimulai saat Rasulullah Saw. masih hidup (Tim Penyusun, 2023:12). Pandangan ini dikuatkan oleh Hasjmy (1993:4), yang merujuk pada sumber Dinasti Tang (618-907 M) bahwa telah ada hubungan diplomatik antara kerajaan di gugusan pulau Melayu dan Cina pada abad ke-7 M. Menurut Baso (2018:73), Islam telah masuk ke Nusantara pada masa pemerintahan Khalifah 'Uṣmān ibn 'Affān, ketika utusan beliau mengunjungi istana Cina pada tahun 651 M. Dalam perjalanannya, para utusan ini sempat singgah di kepulauan Nusantara dan menjadikannya sebagai titik awal interaksi Islam dengan masyarakat lokal. Selanjutnya, pada masa Dinasti 'Umayyah, dibentuk pangkalan dagang Islam di pantai barat Sumatera sekitar tahun 674 M. Mu'awiyah ibn Abi Sufyān bahkan disebut-sebut pernah mengislamkan Raja Jay Sima dari Kalingga. Adapun Raja Sri Indravarman dari Sriwijaya diyakini masuk Islam pada masa Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz (717-720 M) (Azra, 2013:27-28).

Seiring waktu, interaksi ini semakin intensif, terbukti dari catatan H. M. Zainuddin dalam Tarikh Atjeh, yang menyebut rombongan armada Persia sempat singgah di berbagai wilayah Asia

Tenggara termasuk Aceh pada tahun 717 M (Tim Penyusun, 2023:13). Catatan Abu Hasan al-Mas'udi (dalam Baso, 2018:73-74) menggambarkan betapa ramainya lalu lintas kapal Muslim di wilayah laut Cina dan India, yang turut membawa pengaruh Islam ke Nusantara. Aceh menjadi pintu gerbang utama masuknya Islam ke Indonesia. Di sinilah berdiri kerajaan Islam pertama, Samudera Pasai, yang didirikan oleh Sultan Malik al-Shaleh setelah runtuhnya Sriwijaya. Penjelajah seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta mencatat bahwa mazhab Syafi'i sudah dianut luas di Aceh sejak abad ke-14. Bukti arkeologis lain seperti makam Fathimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur, menunjukkan penyebaran awal Islam telah mencapai Jawa pada abad ke-11 (Tim Penyusun, 2023:11).

Proses masuknya Islam ke Nusantara berlangsung secara bertahap dan damai melalui perdagangan, diplomasi, dan dakwah yang akomodatif terhadap budaya lokal (Hasbulah, 1995:21). Hal ini menunjukkan sifat transformatif Islam di Nusantara yang tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga mendorong terbentuknya peradaban baru yang menyatu dengan masyarakat setempat. Menurut Yahdi (2023:66), penyebaran Islam berlangsung relatif cepat karena tiga faktor. Pertama, Islam mengajarkan prinsip kesetaraan dalam kehidupan sosial-keagamaan tanpa membedakan suku, etnis, atau latar budaya, sehingga mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya hidup dalam sistem kasta. Kedua, nilai-nilai Islam sangat selaras dengan semangat berdagang, sehingga para pedagang Muslim mampu membina hubungan yang lebih erat dengan sesama pedagang melalui interaksi ekonomi sekaligus penyebaran ajaran agama. Ketiga, sifat masyarakat Nusantara yang terbuka dan ramah terhadap pendatang turut memudahkan komunikasi dan pergaulan, sehingga Islam dapat diterima dengan baik melalui interaksi sosial yang intensif dengan para penyebar dari luar wilayah. Sementara Fachry Ali dan Bachtiar Effendi (dalam Hasbulah, 1995:19), mengidentifikasi tiga faktor yang mempercepat penyebaran Islam di Indonesia. Pertama, ajaran Islam tentang tauhid, keadilan, dan kesetaraan sosial menarik perhatian karena bertentangan dengan sistem kasta yang ada sebelumnya. Kedua, fleksibilitas ajaran Islam yang universal memungkinkan agama ini diterima berbagai lapisan masyarakat. Ketiga, Islam menjadi kekuatan perlawanan terhadap kolonialisme Barat dan penyebaran agama Kristen oleh penjajah.

Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam dimulai dengan pengajaran syahadat sebagai fondasi utama. Pendidikan dilaksanakan secara bertahap dan mudah dipahami, agar masyarakat dapat menguasai ajaran dasar Islam. Dengan demikian, Islam membawa transformasi besar di Nusantara. Ia datang tidak hanya mengubah sistem kepercayaan, tetapi juga meruntuhkan struktur sosial berbasis kasta. Ajaran persamaan di hadapan Tuhan menjadi kunci penyebaran Islam yang pesat di Nusantara (Umar, 2016:18). Pembelajaran Islam pun menjadi bagian penting dari pendidikan yang tidak hanya bersifat ritual ('*ubudiyah*'), tetapi juga transformatif secara sosial dan budaya. Kedatangan para pendakwah Muslim ke Nusantara membawa angin segar berupa ajaran dan nilai-nilai baru yang berbeda dari sistem kepercayaan sebelumnya. Pertemuan dan dialektika antara Islam dan budaya lokal inilah yang kemudian melahirkan lembaga pendidikan khas Islam di Indonesia, yaitu pesantren (Irawan, 2018:83). Pesantren tumbuh sebagai hasil inkulturasi, adaptasi dan transformasi, dengan mengadopsi unsur-unsur dari sistem pendidikan tradisional Hindu-Buddha seperti *mandala* atau *patapan*, namun dikembangkan dalam kerangka nilai-nilai Islam (Irawan, 2018:169-70).

Walisongo memainkan peran sentral dalam transformasi pendidikan Islam di Nusantara. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga mengembangkan sistem pendidikan yang terstruktur dengan mendirikan sejumlah *dukuh-puntren* dan asrama di berbagai *thani* (istilah untuk menyebut desa pada masa Majapahit). Langkah ini menjadi awal mula penyebaran lembaga pendidikan Islam berbasis komunitas yang akrab dengan masyarakat lokal. Yang menarik, pendekatan Walisongo sangat inklusif. Mereka melakukan proses akulturasi dan inkulturasi budaya, yakni menggabungkan unsur-unsur Islam dengan tradisi lokal secara harmonis. Strategi ini dilakukan antara lain dengan membumikan istilah-istilah Arab ke dalam bahasa dan budaya masyarakat setempat, sehingga ajaran Islam tidak terasa asing. Dalam hal ini, transformasi pendidikan Islam tampak sangat adaptif. Misalnya, istilah Allah diperkenalkan dengan sebutan lokal *Gusti Allah*, Rasulullah menjadi *Kanjeng Nabi*, *syekh* dipadankan dengan *kyai*, dan *ustadz* dengan *guru*. Sementara itu, *santri* digunakan untuk menyebut murid, dan *pesantren* menjadi tempat tinggal dan belajar mereka.

Kata-kata seperti *sembahyang* (*ṣalāt*), *puasa* (*ṣaum*), *selam* (*khiṭāb*), *langgar* (*muṣallā*), *swarga* (*jannah*), dan *neraka* (*nār*) memperlihatkan bagaimana bahasa agama disesuaikan dengan kosakata lokal. Bahkan nilai-nilai spiritual seperti *tawakal* diungkap dalam istilah *ngalah*, *tawāḍu'* menjadi *andhap asor*, dan *rida* menjadi *lilo* (Irawan, 2018:197-98). Transformasi ini menunjukkan betapa pendidikan Islam yang dibawa oleh Walisongo bersifat lentur dan dialogis. Ia tidak datang untuk menggantikan budaya secara frontal, melainkan untuk memperkaya dan menyesuaikannya dalam kerangka Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam di Nusantara berkembang sebagai sebuah gerakan kultural yang berakar kuat dalam tradisi, namun tetap membawa semangat pembaruan.

Pesantren sejak awal telah berperan sebagai pusat pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup seperti pertanian, perdagangan, dan keahlian praktis lainnya. Fungsi pesantren sangat terkait dengan kehidupan masyarakat, sehingga menjadikannya sebagai lembaga pendidikan informal yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya lokal. Transformasi pesantren, baik dalam kelembagaan, metode, maupun nilai, mencerminkan inti pendidikan Islam di Nusantara yang mendalam dan menyeluruh. Pendidikan di pesantren bertujuan untuk meningkatkan moral dan spiritual santri, bukan sekadar pencapaian duniawi. Di sana, santri dilatih untuk menghargai kejujuran, kesederhanaan, kebersihan hati, serta semangat dan disiplin. Pesantren menanamkan nilai-nilai spiritual dan humanistik, serta menjadikan proses belajar sebagai jalan menuju kedekatan dengan Tuhan dan pengabdian kepada sesama (Dhofier, 2009:21). Inilah bentuk nyata dari transformasi pendidikan Islam, di mana proses pengajaran tidak semata-mata bersifat intelektual, tetapi juga menyentuh aspek etika dan batiniah. Pesantren bukan tempat mengejar status atau kekuasaan, melainkan ruang pembentukan jiwa yang mencari *rida* Allah sebagai tujuan tertinggi. Dengan demikian, pendidikan Islam tampil sebagai proses transformatif yang membentuk manusia seutuhnya, yaitu generasi muslim yang berilmu dan bermoral, sekaligus memiliki kedalaman spiritual.

Percepatan penyebaran Islam dan pendidikan Islam transformatif didukung oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam pertama di Sumatera, Samudra Pasai, berdiri pada abad ke-13 dan menjadi pusat penyebaran Islam, mencapai kejayaan pada abad ke-14, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Raja Al-Malik Al-Zahir dikenal sebagai sosok alim bermazhab Syafi'i dan hidup sederhana. Selain Pasai, Kerajaan Perlak berdiri lebih awal pada abad ke-12 dan menjalin hubungan erat dengan Pasai, juga mendirikan lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Kerajaan Aceh berkembang pesat pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang memperluas kekuasaan hingga pesisir timur dan barat Sumatera (Yahdi, 2023:67). Di Jawa, transformasi pendidikan Islam didorong oleh kerajaan-kerajaan seperti Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten, yang seiring dengan dakwah ulama dan Walisongo. Raden Fatah, raja pertama Kesultanan Demak, merupakan lulusan pesantren Ampel Denta, menggambarkan pengaruh pendidikan Islam dalam struktur kekuasaan. Pada masa Sultan Trenggana (1524-1546), Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa, dengan Masjid Demak sebagai simbol penting dalam Islamisasi. Model pendidikan Islam di Demak mirip dengan Aceh, di mana masjid berfungsi sebagai pusat pengajaran agama dengan para guru yang disebut *Bach*. Materi pendidikan tercatat dalam *pinbon* atau suluk yang mencakup doa, pengobatan, dan ajaran tasawuf. Di Kesultanan Mataram, perhatian terhadap pendidikan Islam meningkat meskipun belum ada sistem wajib belajar. Setiap anak usia sekolah belajar mengaji atas kehendak orang tua, dengan pengajian Al-Qur'an tersebar di desa-desa. Materi pengajaran meliputi huruf hijaiyah, bacaan Al-Qur'an, *barzanji*, dan dasar agama Islam. Metode utama adalah hafalan, dipimpin oleh guru modin. Santri yang telah khatam melanjutkan pengajian di pesantren untuk mendalami kitab-kitab agama (Yahdi, 2023:68).

Transformasi pendidikan Islam di Jawa mencerminkan integrasi antara lembaga keagamaan, kekuasaan politik, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, menjadikan pesantren sebagai pusat intelektual dan spiritual dalam sejarah Islam di Nusantara. Walisongo menerapkan pendekatan pendidikan yang terbukti efektif hingga kini, yaitu: pertama, pendekatan *modelling* yang menekankan pentingnya keteladanan, di mana Walisongo tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga menjadi panutan dalam akhlak dan perilaku, mirip dengan Nabi Muhammad dalam membentuk peradaban. Kedua, pendekatan *substantif* yang fokus pada pengajaran inti ajaran Islam seperti akidah,

syariah, dan akhlak, bukan sekadar hafalan atau perbedaan teknis yang memicu perpecahan. Ketiga, pendekatan kasih sayang yang menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan jiwa, dengan guru berperan sebagai orang tua yang mendidik dengan empati dan menciptakan suasana belajar yang nyaman (Yahdi, 2023:69-70). Ketiga pendekatan ini menggambarkan pendidikan Islam transformatif yang tidak hanya mencerdaskan intelek, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas.

2). Masa Kolonial (Abad ke-19 hingga awal Abad ke-20)

Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dimulai dengan perdagangan, diikuti oleh kekuatan militer, dan berlanjut ke penjajahan. Selama periode ini, westernisasi yang meluas di Nusantara merampas sumber daya alam dan mempolitikasi pendidikan pribumi untuk kepentingan kekuasaan. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mendukung kepentingan kolonial. Setelah menguasai politik, Belanda juga mengendalikan bidang sosial dan budaya, termasuk pendidikan dan agama. Pemerintah kolonial membentuk sistem pendidikan dasar bagi pribumi bukan untuk mencerdaskan, tetapi untuk mempermudah pengendalian dan penundukan masyarakat. Pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dianggap tidak mendukung agenda kolonial karena tidak mengajarkan huruf Latin. Sebagai bentuk perlawanan, pesantren semakin banyak mengajarkan huruf Arab Pegon. Belanda merespons dengan membentuk lembaga pengawas keagamaan Priesterraden (1882) dan mengeluarkan regulasi yang membatasi peran guru agama dan lembaga pendidikan Islam, seperti Ordonansi Sekolah Liar (1932), sebagai upaya untuk menghalangi kebangkitan organisasi Islam dan semangat nasionalisme berbasis keagamaan (Umar, 2016:19). Dalam konteks ini, pendidikan Islam transformatif sangat relevan. Berbeda dengan pendekatan kolonial yang mengekang, pendidikan Islam transformatif yang dikembangkan oleh pesantren justru menekankan pembebasan, pemberdayaan, dan kesadaran kritis. Pendidikan ini mendorong para santri untuk memahami realitas sosial secara mendalam dan aktif terlibat dalam perubahan menuju keadilan. Oleh karena itu, pendidikan pesantren dapat dilihat sebagai kelanjutan dari semangat perlawanan terhadap hegemoni kolonial dan sarana untuk membangun kemandirian umat melalui pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan keberpihakan pada rakyat.

Pendudukan Jepang di Indonesia sejak 1942 membawa perubahan dalam sikap terhadap umat Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif, Jepang awalnya bersikap akomodatif terhadap Islam untuk mendapatkan dukungan umat Islam dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang mengeluarkan kebijakan seperti membentuk kantor urusan agama Sumubi yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari, mendukung pesantren, memasukkan pelajaran budi pekerti di sekolah, dan membentuk organisasi seperti Hisbullah, PETA, dan Masyumi (Kasiram, 1986:150). Namun, kebijakan Jepang tetap bersifat politis. Meski memberi ruang bagi pendidikan dan praktik keagamaan, itu bertujuan untuk memperkuat posisi mereka dalam perang, bukan untuk memberdayakan umat Islam. Bahkan ketika kebijakan Jepang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penghormatan kepada Kaisar sebagai Dewa Matahari, ulama tetap menolak tegas, seperti yang ditunjukkan oleh perjuangan KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan (Hasbullah, 1995:65). Pada masa ini, muncul kesadaran untuk memperbaharui pendidikan Islam dengan mengintegrasikan pendidikan umum (seperti sains, matematika, dan bahasa) dengan pendidikan agama, yang menjadi cikal bakal pendidikan Islam modern. Upaya ini bertujuan untuk menyeimbangkan pendidikan agama dan umum, sambil menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga kritis terhadap kekuasaan. Pendidikan Islam transformatif menolak tunduk pada kekuatan politik yang bertentangan dengan nilai tauhid dan keadilan, serta mendorong kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kebenaran. Pendidikan ini menjadi sarana perlawanan intelektual dan spiritual, menanamkan semangat nasionalisme yang berakar dari keimanan, bukan sekadar kepentingan pragmatis kekuasaan.

3). Masa Pasca-Kemerdekaan (1945 hingga Sekarang)

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem pendidikan Islam mengalami perkembangan pesat. Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, dan sekolah mulai mengintegrasikan materi agama ke dalam kurikulumnya.

Pesantren dan madrasah juga mulai mengembangkan diri dengan mengadopsi kurikulum keilmuan modern. Pada 22 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengumumkan bahwa pendidikan di langgar dan madrasah harus diperkuat, serta pendidikan agama di sekolah harus mendapat tempat yang layak. Madrasah dan pesantren juga diminta mendapatkan bantuan dari pemerintah karena peran pentingnya dalam mencerdaskan rakyat (Asrohan, 1999:144). Pada Desember 1946, terbit peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama dimulai di kelas IV Sekolah Rakyat (SR), meskipun pelaksanaannya terkendala oleh kondisi negara yang belum stabil.

Pada tahun 1950, dengan kondisi yang membaik, dibentuk panitia yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dan Mr. Hadi. Panitia ini menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada Januari 1951 yang menetapkan pendidikan agama dimulai dari kelas IV SR dan bisa dimulai dari kelas I di daerah religius. Pengajaran PAI diberikan dua jam per minggu di tingkat lanjutan, dan ditanggung oleh Departemen Agama. Penyempurnaan kurikulum dilanjutkan dengan pembentukan panitia yang dipimpin KH. Imam Zarkasyi, yang hasilnya disahkan oleh Menteri Agama pada 1952 (Nizar, 2011:345). Meski pendidikan Islam telah diatur pada masa Orde Lama, namun keberadaan dua kementerian yang mengelola pendidikan agama dan pendidikan umum menunjukkan adanya dualisme pendidikan, yang menjadi warisan sistemik hingga kini (Umar, 2016:22).

Setelah berakhirnya pemberontakan PKI pada 1 Oktober 1965, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah pemerintahan yang bertekad mengimplementasikan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Dalam rangka membangun manusia seutuhnya, baik rohani maupun jasmani, pemerintah Orde Baru menetapkan sejumlah kebijakan terkait pendidikan agama. Salah satunya, menjadikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah negeri pada setiap jenjang pendidikan, sesuai dengan GBHN pada periode 1973-1978 dan 1983 (Nizar, 2011:349). Selain itu, dalam PELITA IV, dinyatakan bahwa kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diamalkan dalam kehidupan pribadi dan sosial masyarakat, dengan upaya meningkatkan sarana dan fasilitas untuk pengembangan pendidikan agama, mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, pendidikan Islam diperkuat secara konstitusional, melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan pendidikan agama yang telah ada pada masa Orde Lama (Umar, 2016:23).

Pasca-reformasi 1998, pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring dengan perubahan politik dan sosial yang lebih demokratis. Pada masa Presiden KH. Abdurrahman Wahid, pendidikan Islam mulai mendapat perhatian lebih, salah satunya melalui SKB antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, tanggal 30 Maret 2000, yang mengatur pesantren salafiyah dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun. Kebijakan ini membuka peluang bagi pesantren untuk memperoleh regulasi formal dan menyelenggarakan pendidikan dasar dengan kurikulum umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (Fadhila dan Miftah, 2024:47).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi tonggak penting dalam mengakomodasi pendidikan Islam, dan menjadikannya bagian integral dari pendidikan nasional. UU ini juga menegaskan pentingnya pendidikan berbasis karakter yang selaras dengan tujuan pendidikan Islam untuk membentuk individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. Selain itu, dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, status dan peran pesantren semakin diakui, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kurikulum formal dan memperoleh dukungan pembiayaan negara, sekaligus menghasilkan sumber daya manusia kompeten di berbagai bidang. Kebijakan ini juga mendorong pendirian Lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Ma'had Aly, serta program Mu'adalah yang memberikan kesetaraan hukum pada ijazah pesantren.

Konsepsi Pendidikan Islam Transformatif

Pendidikan Islam adalah usaha untuk mengubah sikap dan perilaku individu dengan menanamkan ajaran Islam, yang bertujuan membentuk kepribadian yang berakhlak mulia (ins[un]

kehidupan) melalui pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari harinya (Purnamasari dkk., 2023:16). Posisi ini sejajar dengan peran keluarga dalam pembentukan karakter anak dan untuk meningkatkan efektivitasnya, memerlukan kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Setiap individu berperan dalam menanamkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Kusmardiningih, 2023:24).

Pendidikan Islam juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pendidikan Islam transformatif, yang tidak hanya menanamkan nilai-nilai agama dan moral, tetapi juga menjadi sarana perubahan sosial. Pendidikan Islam transformatif tidak hanya fokus pada ilmu-ilmu keislaman tekstual dan normatif, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menjadi agen perubahan sosial yang konstruktif, berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial dalam pembelajaran, menghasilkan individu yang saleh dan kritis terhadap realitas sosial (Purnamasari, dkk., 2023:16). Secara historis, gagasan dan gerakan pendidikan Islam transformatif mulai berkembang pada 1980-an, terutama dipelopori oleh aktivis LSM dan akademisi (Ali, 2017:5). Perkembangan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kesenjangan antara pemahaman dan praktik keagamaan, yang mendorong lahirnya pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis pengalaman (Prabowo, dkk., 2025, 62). Pemikiran ini berpijak pada keyakinan bahwa inti ajaran Islam adalah kemanusiaan, sehingga Islam harus mampu mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan politik secara nyata. Fokusnya bukan pada doktrin teologis semata, melainkan pada upaya memecahkan masalah-masalah nyata dalam masyarakat, dengan menekankan nilai keadilan sosial dan pemberdayaan (Anwar, 1995:162).

Berdasarkan gagasan paradigma tersebut, pendidikan Islam transformatif dapat dipahami sebagai proses konseptual dan praksis yang dijalankan oleh individu, komunitas, dan institusi untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang humanis. Tujuannya bukan hanya membentuk insan religius, tetapi juga individu yang responsif, kritis, dan solutif terhadap persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan, dengan orientasi kuat pada keadilan sosial (Ali, 2017:7). Pemikiran ini diperkaya oleh dinamika global, termasuk teori pendidikan kritis, teologi pembebasan Amerika Latin, dan teori sosial kritis (Ali, 2017:12). Dalam konteks ini, pesantren diposisikan sebagai pendidikan alternatif dan agen perubahan sosial, yang fokus pada pemberdayaan rakyat, penguatan hak-hak perempuan, keadilan ekonomi, serta kemandirian masyarakat. Inti pendidikan Islam transformatif adalah penerjemahan nilai-nilai inti Islam ke dalam proses pemberdayaan masyarakat secara etis dan spiritual. Prinsip dasarnya adalah pendidikan yang demokratis dan beradab yang menghargai kebebasan berpikir, hak untuk berbeda (*the right to be different*), kesetaraan, dan aktualisasi diri sekaligus membentuk karakter dan spiritualitas yang mendekatkan individu pada Tuhan (*taqarrub il-* Allah).

Gagasan mengenai pentingnya pendidikan Islam yang demokratis dan transformatif pernah disampaikan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh (2005:1-2). Dalam pandangannya, pendidikan pesantren sejak awal kemunculannya merupakan bagian dari aksi kultural dan upaya transformasi sosial. Hingga kini, peran tersebut masih dijalankan oleh pesantren dan menjadi elemen yang paling menentukan karakter sebuah bangsa, karena pendidikan memiliki peranan terpenting dalam proses transformasi sosial. Lebih lanjut menurutnya, demokrasi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan pendidikan yang mampu memotivasi dan menginspirasi perilaku demokratis dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tanpa transformasi nyata tersebut, demokrasi hanya akan berkembang secara teoritis di atas kertas, namun kehilangan relevansi dan korelasinya dengan realitas moral, sosial, dan politik. Padahal, dalam konteks itulah demokrasi seharusnya membuktikan validitas teorinya melalui penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Rohani, 2019:138-39). Salah satu sikap yang dikembangkan dalam pendidikan demokratis transformatif adalah bagaimana pendidikan dapat menghargai perbedaan pendapat dan keadilan gender, dan seterusnya.

Epistemologi pendidikan Islam transformatif berlandaskan pada ajaran al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijmā', dan al-Qiyās, yang menjadi pijakan normatif dan diintegrasikan dengan paradigma keilmuan sosial transformatif. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang berkeadilan dan mengutamakan kemaslahatan publik (*al-maṣlaḥah al-'ammah*) (Rohani, 2019:222). Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, tidak hanya berfungsi menyampaikan ilmu keislaman tradisional, tetapi juga

berperan sebagai agen perubahan sosial melalui internalisasi nilai agama, pembentukan karakter, serta penanaman etos kerja dan kemandirian pada santri. Pesantren sejatinya adalah lembaga pendidikan Islam yang siap menjalankan transformasi sosial, berkat tradisi keterbukaan yang telah lama ada. Pertama, pesantren mengajarkan agama secara komprehensif (k^{alīfah}). Kedua, pesantren memiliki tradisi moderatisme (wasatīyah) yang kuat, dengan cenderung mengambil jalan tengah (taw^{ṣuṭ}) dan menjaga keseimbangan (taw^{ḥūn}) dalam menghadapi perbedaan, demi mencapai kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘^{āmmah}), memuliakan Islam (‘izz al-Islām), serta menghindari ekstremisme dari kedua sisi. Ketiga, pesantren erat terhubung dengan masyarakat, menjadikannya responsif terhadap kebutuhan sosial dan kultural sekitar. Selain sebagai tempat belajar, pesantren juga berfungsi sebagai pelindung, penyelesaian masalah, dan penjaga nilai-nilai lokal yang selaras dengan prinsip Islam. Keempat, pesantren memiliki sifat egalitarian yang kuat, dengan relasi antarindividu tanpa sekat kelas sosial, menciptakan suasana belajar inklusif yang menghormati kesetaraan. Kelima, pesantren memiliki karakter transformatif yang jelas, mirip dengan peran Nabi Muhammad Saw dalam mengubah masyarakat Arab pra-Islam, pesantren mengubah pola pikir, nilai, dan struktur sosial secara bertahap. Keenam, pesantren selalu mengutamakan nilai moral (akhlak) dalam kehidupan individu dan kolektif, yang menjadi fondasi dalam membentuk pandangan hidup yang praktis, humanis, dan spiritual. Sebagaimana ditegaskan KH. Abdurrahman Wahid (dalam Rohani, 2015:129-30) bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran moral umat dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

Contoh peran transformasional pesantren terlihat sejak awal pendiriannya di wilayah yang moral dan spiritualnya masih minim ajaran Islam, seperti pendirian Dukuh Puntren oleh Wali Songo dan Dukuh Lemah Abang oleh Syekh Siti Jenar. Pesantren tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mentransformasikan tatanan sosial dan moral masyarakat setempat. Syekh Siti Jenar, misalnya, ia membawa dua ajaran utama: pertama, konsep kekhalifahan yang mengajarkan setiap individu sebagai wakil Allah dengan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan keadilan; kedua, perubahan sistem sosial dari hierarki feodal menjadi masyarakat ummah yang egaliter, di mana kedudukan manusia hanya ditentukan oleh ketakwaan. Ajaran ini menjadi dasar bagi keadilan sosial dan harmonisasi hubungan antarindividu (Sunnyoto, 2011:113-14). Saat ini, pesantren, sebagai bagian dari pendidikan Islam Nusantara, memainkan peran transformasional melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan kewirausahaan berbasis pesantren (santripreneur), pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan keterlibatan dalam isu-isu sosial seperti penanggulangan kemiskinan, advokasi hak masyarakat marginal, dan isu lingkungan. Beberapa pesantren juga mendirikan lembaga pendidikan vokasional, koperasi syariah, dan pelatihan digital untuk santri dan masyarakat lokal, yang menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya membina aspek spiritual, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan kultural.

Dengan demikian, pendidikan Islam transformatif mencakup beberapa aspek penting untuk perkembangan individu secara menyeluruh. Pertama, pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek jasmani, rohani, akademik, dan sosial untuk mengembangkan individu secara holistik. Aspek jasmani bertujuan untuk kesejahteraan fisik, rohani untuk penguatan nilai moral dan spiritual, akademik untuk pengembangan intelektual, dan sosial untuk interaksi yang harmonis dalam masyarakat. Kedua, pendidikan ini menekankan integrasi antara ilmu agama dan sains, menghasilkan individu yang kompeten dalam agama dan ilmu pengetahuan. Ketiga, pendidikan transformatif berfokus pada peningkatan kecerdasan spiritual, menggunakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera dan hati nurani untuk menyelesaikan masalah duniawi (Prabowo, dkk, 2025:62). Dalam pendidikan Islam transformatif, agenda humanisasi menjadi sangat penting, yaitu memanusiakan manusia dengan menyadarkan masyarakat dari dominasi kekuasaan ekonomi dan mayoritarianisme yang menindas kelompok minoritas. Pendidikan Islam harus menjadi sarana pembebasan yang menegaskan keadilan sosial dan kesadaran kritis. Konsep kesadaran transformatif yang dikembangkan oleh Freire (2019) bertujuan membebaskan manusia dari penindasan dan ketidakadilan struktural melalui pendidikan yang mendorong kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial. Gus Dur juga menegaskan bahwa Islam tidak hanya sekadar ekspresi keimanan formal, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk membela kemanusiaan, khususnya membebaskan

kelompok tertindas. Upaya pembebasan ini harus dimulai dari pendidikan sebagai instrumen utama dalam melawan ketidakadilan dan ketimpangan sosial.

Islam harus melampaui ekspresi simbolik dan menjadi kekuatan transformatif yang mengangkat derajat manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan keterasingan. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus menjadi agen perlawanan kultural yang inklusif, mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain, kelompok politik, dan kebudayaan berbeda, selama mereka berbagi visi kemanusiaan yang sama. Melalui pendidikan yang adil dan humanis, yang menghargai nilai kemanusiaan tanpa memandang agama, etnis, atau ras, Islam dapat menjadi kekuatan pembebas sejati bagi seluruh umat manusia (Rohani, 2015:151). Dengan demikian, pendidikan Islam transformatif adalah pendekatan yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu agama secara tekstual dan normatif, tetapi juga bertujuan membentuk individu yang dapat melakukan perubahan sosial positif berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam pendidikan Islam transformatif, proses pembelajaran bertujuan untuk: (1) Menumbuhkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan dan kesenjangan sosial; (2) Mengembangkan sikap proaktif dalam membela nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan; (3) Menggabungkan ilmu agama dengan sains dan teknologi, sehingga lulusan dapat berkompetisi dan berkontribusi di dunia modern; (4) Memberdayakan peserta didik untuk menjadi agen perubahan di masyarakat berdasarkan prinsip Islam *rahmatan lil ‘ālamīn*. Konsep ini berakar pada prinsip pendidikan sebagai proses pembebasan (*tahrīr*), pembentukan (*takwīn*), dan perubahan (*taghyīr*) masyarakat, dengan pijakan tauhid dan keadilan sosial.

Sebagai agen perubahan sosial masyarakat (*agent of social change*), pendidikan Islam diharapkan dapat melakukan reformasi, rekonstruksi, dan perubahan menuju perbaikan. Namun, sistem dan pola pendidikan Islam yang ada di Indonesia saat ini, terutama yang masih mengandalkan pendidikan tradisional, telah kehilangan semangat transformatifnya. Mahmud Arif (2008:229) mengutip pendapat Parvez Hoodbhoy membandingkan pola pendidikan tradisional dan pendidikan modern dalam tabel berikut:

Pendidikan Tradisional	Pendidikan Modern
- Orientasi akhirat; orientasi ke masa silam	- Orientasi modern; orientasi ke masa depan
- Tujuan untuk sosialisasi ke dalam Islam	- Tujuan untuk perkembangan individualitas
- Kurikulum tidak berubah sejak abad pertengahan	- Kurikulum mengikuti perubahan mata pelajaran
- Pengetahuan diwahyukan dan tidak dapat diubah	- Pengetahuan diperoleh melalui proses empiris dan deduktif
- Pengetahuan diperoleh karena perintah Tuhan	- Pengetahuan diperlukan sebagai alat pemecahan masalah
- Mempertanyakan persepsi dan asumsi tidak dibenarkan	- Mempertanyakan persepsi dan asumsi dibenarkan
- Cara mengajar otoriter-indoktrinatif (tidak melibatkan partisipasi murid)	- Cara mengajar melibatkan partisipasi murid
- Menghafal (<i>memorizing</i>) di luar kepala sangat dipentingkan	- Internalisasi konsep kunci sangat dipentingkan
- Pola pikir murid adalah pasif; selalu menerima, dan	- Pola pikir murid adalah aktif-positivistik (kritis), dan
- Pendidikan tidak terdiferensiasi	- Pendidikan dapat menjadi sangat terspesialisasi

Dalam pandangan Arif (2008:229-300), pendidikan Islam idealnya memiliki tiga peran utama. Pertama, fungsi pelestarian dinamis, yaitu mempertahankan nilai-nilai budaya esensial secara selektif

(al-muḥāfaẓah ‘ala al-qadīm al-ṣūḥih), tanpa kaku, sambil terbuka terhadap unsur-unsur baru yang relevan (al-akhḍ bi al-jadīd al-aṣlah). Kedua, fungsi partisipatoris, di mana pendidikan Islam hadir untuk memenuhi kebutuhan dan realitas masa kini, mengintegrasikan nilai-nilai lama dan kontemporer untuk membentuk kepribadian peserta didik yang adaptif. Ketiga, fungsi preparatoris-antisipatoris, yakni mempersiapkan generasi muda untuk peran aktif dan konstruktif dalam masyarakat masa depan. Pendidikan Islam berkaitan erat dengan aspek praktis dan sosial, yang memerlukan transformasi terus-menerus untuk merespons permasalahan masyarakat. Untuk mewujudkan transformasi masyarakat, ada tiga dimensi utama yang harus dimainkan, yaitu: pertama, penegasan bahwa manusia merupakan makhluk mulia ciptaan Tuhan, baik individu maupun sosial; kedua, mengubah struktur sosial yang timpang dan menjadi akar kemiskinan serta kebodohan; ketiga, menegakkan demokrasi sejati dan memperjuangkan keadilan (Wahid, 1983:80-81). Kerangka ideologis ini menegaskan bahwa pendidikan Islam harus berorientasi pada pemberdayaan dan transformasi masyarakat menuju tatanan sosial yang adil, terbuka, dan menghargai nilai-nilai kejujuran serta kebebasan. Watak pembebasan dalam ajaran Islam diwujudkan dengan merombak tatanan sosial yang tidak adil, melalui pendidikan yang mengadopsi paradigma kritis-transformatif. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang aktif dan sadar terhadap realitas sosial, dengan kemampuan untuk mendiskusikan masalah lingkungan secara terbuka, terlibat dalam penyelesaiannya, dan membekali diri untuk menghadapi tantangan zaman dengan kesadaran dan ketahanan, bukan pasif mengikuti otoritas eksternal tanpa pemikiran kritis (Rohani, 2015:185).

Pendidikan yang demikian mampu mendorong pengembangan kesadaran kritis peserta didik terhadap kondisi sosial dan memberikan dorongan untuk mengubahnya ke arah yang lebih adil dan manusiawi. Dalam teori pemikiran pendidikan, terdapat dua aliran utama. Pertama, aliran reproduktif, yang memandang pendidikan sebagai sarana pelestarian ilmu, nilai, dan struktur sosial yang ada, cenderung pasif, dan minim kontribusi terhadap perubahan sosial. Kedua, aliran produktif, yang melihat pendidikan sebagai ruang untuk resistensi terhadap sistem dominan dan berperan dalam membangun kesadaran pembebasan. Meskipun peranannya kecil, pendidikan dalam kerangka pemberdayaan dan kesadaran kritis tetap dapat berkontribusi pada transformasi sosial (Masnur, 2001:88-89). Menurut Gus Dur (dalam Rohani, 2015:187), sistem pendidikan di Indonesia masih mengandung kekeliruan konseptual karena lebih menekankan pada pencapaian formal berupa ijazah, ketimbang mengedepankan substansi pendidikan sebagai sarana memanusiakan manusia. Konsekuensinya, pendidikan di Indonesia belum mampu berperan sebagai alat pembebasan masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan, dan penindasan, serta gagal membangkitkan daya kritis peserta didik (Mahfud, 2010:205-8). Dalam kerangka pendidikan kritis, seharusnya pendidikan berfungsi sebagai ruang reflektif untuk mengkritisi ideologi dominan (*the dominant ideology*) dan mendorong transformasi sosial. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan, serta melakukan advokasi dan dekonstruksi terhadap sistem sosial yang menindas. Pendidikan kritis berorientasi pada humanisasi, yaitu mengembalikan harkat dan martabat manusia, serta membebaskan individu dari sekat-sekat diskriminatif dan menindas.

Pendidikan sebagai alat pembebasan harus mencerminkan watak pembebasannya dengan melaksanakan fungsi manusia sebagai khalīfah Allāh di muka bumi, dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan derajat di hadapan hukum. Pendidikan transformatif, yang berfokus pada perubahan sosial, bertujuan menciptakan tatanan sosial yang lebih maju, beradab, dan berkeadilan. Asumsi dasarnya adalah bahwa masyarakat yang tertindas dan terbelakang, baik secara struktural maupun kultural, harus dibebaskan untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan (Rohani 2015, 188). Paradigma pendidikan Islam kritis-transformatif memandang pendidikan sebagai alat perlawanan terhadap ketimpangan sosial, yang mengaitkan pendidikan dengan kesadaran kritis, kesetaraan gender, dan kepedulian lingkungan. Semua elemen ini saling mendukung dalam proses transformasi sosial yang bertahap namun progresif. Dalam pandangan ini, peserta didik dianggap sebagai subjek aktif yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, dengan hubungan pendidik dan peserta didik yang bersifat kemitraan, bukan hierarkis. Pendidikan kritis-transformatif memerlukan metode dialogis, yang memungkinkan komunikasi terbuka untuk mencari kebenaran bersama. Pendekatan ini berlandaskan pada filsafat andragogi, yang menekankan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, berbeda dengan pendekatan pedagogis yang melihat peserta didik

sebagai objek pasif (Rohani, 2015:189-90). Secara umum, Masnur (2001:105) membedakan kedua pola ini dalam tabel berikut:

Aspek	<i>Andragogi</i>	<i>Pedagogi</i>
Tujuan	Pemindahan pengetahuan dari satu generasi ke generasi	Merangsang peserta agar timbul keinginan untuk terlibat dalam proses penemuan yang ingin diketahui
Peserta	Diutamakan untuk anak-anak	Orang dewasa
Penentu materi	Guru / pendidik	Peserta didik
Waktu	Sebatas waktu pendidikan formal	Seumur hidup (long life education)
Pembentukan konsep diri	Guru sangat dominan (mondog)	Timbal balik dalam proses belajar mengajar (take and give)
Pengalaman	Pengetahuan dan pengalaman guru lebih utama	Pengetahuan dan pengalaman guru dan peserta didik merupakan sumber yang kaya untuk bahan pembelajaran

Pendidikan Islam kritis-transformatif menjadi penting karena tidak hanya fokus pada kesalahan individu, tetapi juga berperan dalam membebaskan umat dari eksklusivisme budaya dan fanatisme primordial (Rohani, 2015:190-91). Dengan demikian, pendidikan Islam kritis-transformatif menuntut perubahan dalam relasi antara pendidik dan peserta didik agar bersifat dialogis dan setara, bukan hierarkis dan otoriter. Dua agenda utama yang perlu diperjuangkan adalah transformasi internal dan eksternal. Transformasi internal fokus pada pembebasan hubungan antara pendidik dan peserta didik serta penataan ulang struktur pengetahuan yang sering dipengaruhi kekuasaan. Sementara transformasi eksternal lebih diarahkan pada perubahan sosial yang lebih luas dengan merombak struktur sosial yang tidak adil.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan Islam Transformatif di Indonesia

1) Tantangan Pendidikan Islam Transformatif

Di tengah laju modernisasi yang pesat, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi isi ajaran maupun pendekatan pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pendidikan yang berorientasi transformatif untuk memastikan pendidikan Islam tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat (Aminuddin, 2025:24). Penerapan pendidikan Islam transformatif harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik yang membentuk lingkungan pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan perlu disusun dengan memperhatikan keberagaman kebutuhan masyarakat serta menghargai nilai-nilai lokal yang berkembang. Pendidikan Islam transformatif perlu berlandaskan prinsip keberlanjutan, dengan menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar alih pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter dan internalisasi nilai moral yang mendalam (Pare dan Sihotang, 2023: 27779). Namun dalam praktiknya, pendidikan Islam transformatif di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan besar, yaitu:

a) Sistem Pendidikan Konservatif

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria pendidikan yang kritis dan transformatif. Meskipun secara makro mengadopsi pendekatan liberal, praktik pendidikan nasional masih terjebak dalam paradigma konservatif. Hal ini terlihat pada kecenderungan privatisasi lembaga pendidikan, relasi pedagogis yang hierarkis, dan orientasi pendidikan yang terpengaruh oleh kapitalisme. Globalisasi telah menyebabkan pendidikan beralih fungsi, dari alat pencerdasan dan pembebasan menjadi komoditas yang bergantung pada logika pasar. Fenomena ini menciptakan ketimpangan akses pendidikan, dengan masyarakat berpenghasilan

rendah semakin terpinggirkan. Pendidikan lebih menekankan pada penciptaan *homo economicus*, individu yang hanya dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Dalam pemikiran Freire (2019:35), kondisi ini mencerminkan dominasi kesadaran magis dan naif, yang menghambat daya kritis dan semangat inovatif. Dampak dari liberalisasi pendidikan juga terlihat dalam komersialisasi, yang memaksa mahasiswa lebih fokus pada pragmatisme ketimbang idealisme dan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Akibatnya, lulusan pendidikan tinggi terjebak dalam logika pasar dan karier pribadi, bukan lagi bekerja untuk kepentingan publik (Aminuddin, 2025:32-33).

b) Fragmentasi Kurikulum

Pendidikan Islam memiliki warisan konseptual yang luas, bertujuan membentuk pribadi Muslim yang utuh untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, pendekatan yang sering normatif kadang menyebabkan jarak antara idealisme ajaran dan realitas kehidupan. Dalam praktiknya, pendidikan Islam masih terjebak pada pemahaman literal terhadap wahyu tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial dan kontekstual. Sebagai contoh, meskipun Nabi Muhammad SAW menjadi model utama pendidikan Islam, beliau aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjadikan pendidikan Islam lebih relevan, perlu diintegrasikan dengan paradigma pendidikan kritis, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Langkah konkret yang bisa dilakukan mencakup pembaruan orientasi pendidikan, perumusan kurikulum yang adaptif, penguatan kapasitas pendidik, serta reformasi manajemen pendidikan.

Kurikulum pendidikan Islam yang kritis-transformatif harus mampu mengintegrasikan dimensi teks (*nash*) dan konteks (*realitas*). Pembelajaran kontekstual sangat penting, di mana materi pelajaran tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga relevan dengan masalah nyata yang dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari (Aminuddin, 2025:30). Misalnya, pembahasan mengenai kerusakan lingkungan harus dikaitkan secara langsung dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang amanah manusia sebagai khalifah, serta dikontekstualisasikan dengan isu lokal seperti kerusakan alam dan sebagainya. Dengan demikian, pendidikan Islam akan lebih bermakna jika mampu memasukkan isu-isu lokal serta kearifan budaya setempat ke dalam kurikulum. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan Islam transformatif adalah merancang kurikulum yang adaptif terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam. Kebijakan pendidikan transformatif harus mampu menjembatani warisan keilmuan tradisional dengan tuntutan inovasi kontemporer. Dalam konteks ini, madrasah dan perguruan tinggi Islam dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus bergerak. Kementerian Agama memegang peran strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang inklusif dan kontekstual, baik di level nasional maupun lokal. Kebijakan tersebut harus mencerminkan keseimbangan antara dinamika internal kelembagaan dan pengaruh eksternal yang membentuk arah serta isi pendidikan Islam ke depan (Aminuddin, 2025:26).

c) Stereotype Terhadap Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sering kali distereotipkan sebagai sistem yang konservatif dan kurang responsif terhadap dinamika zaman. Pandangan ini muncul karena adanya anggapan bahwa pendidikan Islam terlalu menitikberatkan pada aspek spiritual dan ritual, sementara mengabaikan dimensi praktis, saintifik, dan kontekstual kehidupan modern. Stigma ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam komunitas Muslim sendiri, yang kerap memandang pendidikan umum atau sekuler sebagai lebih maju dan kompetitif dibanding pendidikan keagamaan (Ali, 2017:17). Akibat stereotype tersebut, pendidikan Islam menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama, terjadi marginalisasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, baik dalam hal kebijakan maupun alokasi pendanaan. Kedua, lulusan pendidikan Islam kerap dianggap kurang kompetitif di dunia kerja karena dinilai tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri. Ketiga, muncul krisis kepercayaan dari masyarakat

terhadap kapasitas pendidikan Islam dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, seperti sains, teknologi, ekonomi, dan transformasi sosial. (Muqowim, 2004:97).

Stereotipe tersebut turut memperkuat dualisme dan dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum, yang sejatinya bertentangan dengan esensi pendidikan Islam. Islam memandang urusan dunia dan akhirat sebagai dua aspek yang saling melengkapi, bukan terpisah. Sejarah peradaban Islam membuktikan hal ini melalui tokoh-tokoh seperti Ibn Sina, Al-Farabi, dan Al-Khawarizmi, yang berhasil mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan sains, filsafat, dan matematika secara harmonis (Pransiska, 2018:174).

d) Adanya Kecenderungan Radikalisme dan Ekstrimisme

Munculnya kecenderungan radikalisme dan ekstremisme di kalangan sebagian generasi muda turut serta menjadi tantangan serius dalam pengembangan pendidikan Islam transformatif. Radikalisasi ini umumnya tumbuh subur di lingkungan pendidikan yang tidak memberikan pemahaman utuh tentang Islam sebagai agama yang moderat, inklusif, dan *rahmatan lil ‘ālamīn* (Fathurrochman dan Muslim, 2021). Ketika pendidikan agama diajarkan secara kaku dan dogmatis, peserta didik menjadi rentan terhadap tafsir sempit yang melahirkan intoleransi dan kekerasan atas nama iman. Akibatnya, lahir generasi eksklusif yang mengklaim kebenaran tunggal, melemahkan semangat dialog, dan meretakkan kohesi sosial. Radikalisasi semacam ini juga menimbulkan kecurigaan terhadap lembaga pendidikan Islam, mencoreng citra Islam sebagai agama damai, serta menghambat proses integrasi sosial.

e) Keterbatasan Infrastruktur dan Akses

Salah satu tantangan serius dalam sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam, adalah ketimpangan akses dan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah terpencil kerap kekurangan fasilitas, tenaga pendidik, sarana pembelajaran, dan teknologi, yang berdampak langsung pada rendahnya kualitas layanan pendidikan. Akibatnya, peserta didik di wilayah rural tertinggal dalam literasi, numerasi, dan akses informasi, memperkuat siklus kemiskinan dan keterbelakangan sosial. Ketimpangan ini juga melahirkan eksklusi sosial dan memperlebar kesenjangan kelas. Ketika pendidikan bermutu hanya dinikmati kalangan tertentu, ia berhenti menjadi hak, dan berubah menjadi privilese. Dalam perspektif pendidikan Islam transformatif, ketidaksetaraan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah keadilan sosial yang harus diperjuangkan.

2) Peluang Pengembangan Pendidikan Islam Transformatif

Di sisi lain, ada berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan Islam transformatif di Indonesia:

a) Menguatnya Kesadaran Demokrasi Masyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi membuka peluang strategis bagi penguatan pendidikan Islam transformatif. Di tengah era reformasi dan keterbukaan, masyarakat semakin menghargai partisipasi, hak asasi, dan keberagaman, sehingga menjadi landasan penting bagi pendidikan Islam untuk menanamkan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, serta keterbukaan intelektual. Demokrasi dalam konteks ini dipahami sebagai budaya pendidikan yang mendukung dialog, musyawarah, dan kepemimpinan partisipatif. Pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam berperan penting dalam membentuk generasi religius, kritis, dan inklusif. Selain itu, iklim demokratis mendorong kemitraan yang lebih luas antar pemangku kepentingan, serta memperkuat pendidikan Islam sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan. Dengan demikian, demokratisasi masyarakat menjadi fondasi bagi terwujudnya pendidikan Islam yang adil dan berkeadaban..

b) Pembelajaran *Deep Learning*

Dalam era revolusi industri 4.0, pendidikan Islam transformatif perlu beralih dari pembelajaran dangkal (*surface learning*) yang “fikih oriented” menuju pembelajaran *deep learning* yang lebih reflektif dan kontekstual. *Deep learning* mendorong peserta didik untuk memahami makna, menganalisis kritis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata, seperti keadilan dan tanggung jawab sosial, dalam menghadapi isu kontemporer. Pendekatan ini memperkaya pengalaman pembelajaran dengan studi kasus, proyek, dan diskusi reflektif, serta mendalami aspek karakter dan spiritualitas. Selain mengembangkan kecerdasan kognitif, *deep learning* dalam pendidikan Islam transformatif juga membentuk peserta didik yang berintegritas, bijak, dan memiliki kepekaan sosial dan kedalaman spiritual, serta mampu menjadi agen perubahan dan transformasi masyarakat.

c) Integrasi Muatan Lokal

Salah satu peluang penting dalam pendidikan Islam transformatif adalah integrasi muatan lokal dalam kurikulum. Di tengah globalisasi, muatan lokal, seperti kesenian atau pelajaran ke-NU-an di sekolah/madrasah Ma'arif, misalnya, memberi ruang untuk menghubungkan ajaran Islam dengan realitas sosial-budaya masyarakat. Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kearifan lokal (*local wisdom*), kelestarian alam, musyawarah, dan gotong royong secara kontekstual. Ini juga memperkuat identitas budaya dan keagamaan peserta didik, sekaligus mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan dunia global. Integrasi muatan lokal mendorong partisipasi aktif masyarakat, menciptakan sinergi antara pendidikan, tokoh adat, agama, dan lingkungan. Ini menjadikan pendidikan Islam sebagai pusat transformasi sosial yang relevan dan partisipatif, menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sadar identitas dan siap membangun peradaban.

d) Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam

Organisasi sosial keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya memainkan peran kunci dalam pengembangan pendidikan Islam transformatif di Indonesia. Mereka tidak hanya mengelola lembaga pendidikan, tetapi juga menjaga nilai, memperbaiki sistem, dan memperkuat akses pendidikan yang berlandaskan keadilan sosial. NU, melalui LP Ma'arif, mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kebangsaan serta moderasi beragama. Muhammadiyah, dengan filosofi Islam Berkemajuan, menekankan integrasi ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan modern, serta membentuk pribadi yang saleh dan kritis. Organisasi lain seperti Persis dan DDII juga berperan dalam pendidikan Islam yang merespons kebutuhan zaman. Keunggulan mereka terletak pada jaringan luas, basis massa yang kuat, dan legitimasi sosial, yang memungkinkan mereka untuk melakukan inovasi kurikulum dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara organisasi-organisasi ini dengan pendidikan Islam transformatif dapat mempercepat terwujudnya sistem pendidikan yang kontekstual, progresif, dan berorientasi pada keadilan sosial di Indonesia.

Urgensi Pendidikan Islam Transformatif di Indonesia

Pendidikan Islam transformatif di Indonesia memiliki urgensi yang mendalam dan strategis dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu membentuk karakter, moralitas, dan kompetensi peserta didik sesuai dengan tuntutan era modern (Purnamasari dkk. 2023, 17).

a). Menjawab Tantangan Multidimensi

Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, termasuk perkembangan teknologi, ideologi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, tantangan internal seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola pendidikan juga menjadi perhatian utama. Untuk itu, diperlukan transformasi dalam pendekatan pendidikan Islam

agar mampu menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, solidaritas, dan visi yang jelas dalam menghadapi dinamika zaman (Johan dkk. 2024, 13).

b). Integrasi Aspek Jasmani, Rohani, Akademik, dan Sosial

Pendidikan Islam transformatif menekankan pentingnya integrasi empat aspek utama: jasmani, rohani, akademik, dan sosial. Pendidikan jasmani memberikan dasar bagi kesejahteraan fisik dan kesehatan individu Muslim. Pendidikan rohani membangun nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Pendidikan akademik menciptakan landasan ilmiah yang kokoh, sementara pendidikan sosial mempromosikan interaksi yang harmonis dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terbentuk generasi Muslim yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan landasan yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan (Purnamasari dkk., 2023:19).

c). Moderasi Beragama sebagai Pilar Pendidikan Islam

Dalam menghadapi tantangan ideologi dan radikalisme, moderasi beragama menjadi salah satu pilar penting dalam pendidikan Islam transformatif. Pendidikan Islam di Indonesia perlu menekankan nilai-nilai moderasi beragama yang mencakup sikap toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan perlunya moderasi beragama sebagai salah satu prioritas. Moderasi beragama terus menjadi isu aktual yang belum usai (absence) dikarenakan Indonesia merupakan negara yang plural (Adibah dkk. 2023:284). Moderasi beragama penting dilakukan untuk membentuk cara pandang, cara bersikap dan berperilaku dengan mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama (Amri 2021, 179). Moderasi beragama yang dimaksud menempatkan Islam sebagai agama yang *wasatiyyah*, menjauhi ekstremisme dan intoleransi, serta tercermin dalam aspek fikrah (pemikiran), *'aqidah* (keyakinan), *harkah* (gerakan), dan *'amliyyah* (praktik ibadah) (Ibda dan Sofanudin 2021, 174).

Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, di tengah meningkatnya pelabelan kafir terhadap orang lain (takfiryah), tindakan radikalisme dan perilaku kekerasan (Fahmi dkk. 2022, 1028), moderasi beragama menjadi kebutuhan mendasar untuk membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan penuh penghargaan terhadap perbedaan. Moderasi beragama bukan berarti untuk memoderasi agama, karena pada hakekatnya dalam semua ajaran agama telah terdapat ajaran moderasi. Namun dimaksudkan untuk memoderasikan pemikiran, cara pandang dan perilaku orang yang beragama itu sendiri yang diprakrikan dalam kehidupan sehari-hari (Aziz dan Anam 2021, 21). Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran (Maarif, 2021).

d). Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan

Pendidikan Islam transformatif tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepemimpinan. Melalui pendekatan yang holistik, pendidikan Islam diharapkan dapat mencetak generasi yang memiliki akhlak mulia, integritas tinggi, dan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang visioner di masa depan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

e). Adaptasi terhadap Era Digital

Di era digital, literasi digital menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Integrasi literasi digital dalam pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis dan etika digital yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat

mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di dunia digital secara bijak dan bertanggung jawab.

PENUTUP

Sebagai penutup, diskursus pendidikan Islam transformatif di Indonesia menuntut adanya paradigma baru yang lebih inklusif, kontekstual, dan progresif. Pendidikan Islam tidak lagi dapat dipandang sebagai domain terbatas yang hanya menekankan hafalan teks agama, melainkan harus mampu menjawab tantangan zaman dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keilmuan kontemporer. Dalam hal ini, pendidikan Islam transformatif harus memperkuat kualitas intelektual, moral, dan sosial peserta didik, sehingga mereka tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika global. Pendidikan Islam harus membekali generasi muda dengan keterampilan kritis dan kreatif untuk berkontribusi dalam perubahan sosial yang adil, tanpa kehilangan akar spiritualitasnya.

Selain itu, sinergi antara lembaga pendidikan Islam, organisasi sosial keagamaan, dan pemerintah merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Melalui kerjasama yang solid, pendidikan Islam di Indonesia dapat diubah menjadi kekuatan transformatif yang tidak hanya membebaskan peserta didik dari ketertinggalan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan, keadilan sosial, dan penguatan identitas budaya, pendidikan Islam transformatif diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih cerdas, bijaksana, dan penuh empati, serta siap menghadapi tantangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ida Zahara, Amie Primarni, Noor Aziz, Siti Noor Aini, dan M. Daud Yahya. 2023. "Revitalisasi Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sebagai Rumah Moderasi Beragama di Indonesia." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12 (1): 283–98.
- A'la, Abd. 2006. *Penbaharuan Pesantren*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS.
- Ali, Mohamad. 2017. "Arus Pendidikan Islam Transformatif Di Indonesia: Sebuah Penjajagan Awal." *SUHUF Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya* 29 (1).
- Aminuddin, M. Yusuf. 2025. "Dimensi Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam (Studi Fenomenologi Kebijakan Kementerian Agama Indonesia)." *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 8 (1): 24–41.
- Amri, Khairul. 2021. "Moderasi Beragama Perspektif Agama-agama di Indonesia." *Living Islam Journal of Islamic Discourses* 4 (2). <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i2.2909>.
- Anwar, M. Syafii. 1995. *Penikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Arif, Mahmud. 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS.
- Asrohan, Harun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. 1. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Aziz, Abdul, dan A. Khoirul Anam. 2021. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Azra, Azyumardi. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Penbaharuan Islam Indonesia*. Edisi Parennial. Depok: Prenadamedia Group.
- Baso, Ahmad. 2018. *Islamisasi Nusantara dari Era Khalifah Usman bin Affan hingga Walisongo (Studi tentang Asal-usul Intelektual Islam Nusantara)*. Cet. 1. Tangerang Selatan: Pustaka Afid.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2009. *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*. Cet. 1. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Fadhila, Sayyida Safir, dan Muhammad Miftah. 2024. "Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru dan Tantangannya Menghadapi Era Disrupsi ." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 5 (1).

- Fahmi, Muhammad, Senata Adi Prasetia, Abd. Rouf, Syaifuddin Syaifuddin, Sukron Djazilan, Muhammad Salman Alfarizi, dan Adam Sukron Ma'mun. 2022. "Urgensi Pengarusutamaan Moderasi Beragama melalui Aktualisasi Doktrin Aswaja An-Nahdliyah di Sekolah." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6 (1). <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.390>.
- Fathurrochman, Irwan, dan Abu Muslim. 2021. "Menangkal Radikalisme Dengan Penguatan Pendidikan Karakter Nasionalisme Melalui Amaliyah Aswaja di SD Islamiyah Magetan." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 13 (2). <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.1071>.
- Freire, Paulo. 2019. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Hasbulah. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Cet. 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hasjmy, Ahmad. 1993. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Al-Ma'arif.
- Ibda, Hamidulloh, dan Aji Sofanudin. 2021. "Program Gerakan Literasi Ma'arif dalam Meningkatkan Moderasi Beragama (Wasatiyyah Islam)." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 15 (2). <https://doi.org/10.38075/tp.v15i2.232>.
- Irawan, Aguk. 2018. *Akar Sejarah Etika Pesantren di Nusantara: dari Era Sriwijaya sampai Pesantren Tebu Ireng dan Ploso*. Cet. 1. Bandung: Mizan Media Utama.
- Johan, Budi, Farah Miftahul Husnah, Alfianti Darma Puteri, Hartami, Ahda Alifia Rahmah, Anzili Rahma, dan Jannati Adnin. 2024. "Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam dalam Konteks Modern ." *Publishing Jurnal Pendidikan Islam* 1 (1): 1–24.
- Kasiram, Moh. 1986. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Kusmardiningsih, W T. 2023. "Pendidikan Islam Transformatif Imam Al-Ghazali: Upaya Mewujudkan Generasi Berakhlak Mulia." *MANAGIERE: Journal of Islamic...* 2 (2).
- Maarif, Saiful. 2021. "Menuju Pendidikan Islam Transformatif (Refleksi dan Proyeksi Arah Pendidikan Islam)." <https://kemenag.go.id/>. 22 Desember 2021.
- Mahfud, Choirul. 2010. *Pendidikan Multikultural*. Cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfudh, KH. MA Sahal. 2005. "Mengkritisi Pendidikan Pesantren." Dalam *Ceramah ilmiah "Mengkritisi Pendidikan Santri di Pesantren"*. Pati.
- Masnur, M. Badi' Zamanil. 2001. *Pendidikan Kritis Transformatif: Panduan Pendidikan dan Kaderisasi*. Jakarta: PB PMII.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muqowim. 2004. "Menggagas Pendidikan Islam Transformatif Upaya Mewujudkan Kesadaran Profetik dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (1).
- Nizar, Samsul. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam Mendusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pare, Alprianti, dan Hotmaulina Sihotang. 2023. "Pendidikan Holistik untuk Mengembangkan Keterampilan Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Era Digital." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (3).
- Prabowo, Ari Yudhanto, Jimmy Malintang, dan Mahfud Junaedi. 2025. "Pendidikan Islam Transformatif dalam Menjembatani Diskursus Agama dan Sains untuk Masa Depan Kemanusiaan." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4 (2).

- Pransiska, Toni. 2018. "Pendidikan Islam Transformatif Syekh Nawawi Al-Bantani: Upaya Mewujudkan Generasi Religius-Saintifik." *Jurnal Ilmiah Didaktika* 18 (2). <https://doi.org/10.22373/jid.v18i2.3241>.
- Purnamasari, Iin, Rahmawati, Dwi Noviani, dan Hilmin. 2023. "Pendidikan Islam Transformatif ." *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (4).
- Rohani. 2015. *Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren: Memperteguh Nilai-nilai Pesantren bagi Transformasi dan Komoditanisme Peradaban Islam Nusantara*. Cet. 1. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Rohani, Edi. 2018. *Menyusuri Jejak Peradaban: The Authorized Biography of Mbah Ahmad Alim Bulus*. Cet. 3. Wonosobo: eLKLIM .
- . 2019. *Menyemai Generasi Shalih dan Akram: Konsep Pendidikan Islam KH. MA Sahal Mahfudh*. Semarang: Asna Publisher Semarang.
- Shidiq, Ngarifin. 2020. *Dinamika Pesantren: Pergulatan Demokrasi dan Tradisi*. Cet. 1. Wonosobo: UNSIQ Press.
- Sholikhah, Khotimatus, Mahmuhtarom Halimun Rasyid, Ifada Retno Ekaningrum, dan Mudzakkir Ali. 2023. "Tantangan Pendidikan Agama Islam di Era Disrupsi Perspektif Budaya Islam Nusantara." *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 6 (2).
- Sunyoto, Agus. 2011. *Suluk Abdul Jalil (Perjalanan Ruhani) Syekh Siti Jenar* 1. Cet. 4. Yogyakarta: LKiS.
- Supardi. 2021. "Pendidikan Pesantren dalam Mengantisipasi Dampak Negatif Era Globalisasi di Pondok Pesantren Hidayattullah Batam." *TADTRIBUNA: Journal of Islamic Education Management* 1 (1). <https://doi.org/10.61456/tjiec.v1i1.6>.
- Tim Penyusun. 2023. *Sejarah Perkembangan Islam di Wonosobo Historiografi Ulama dan Pesantren*. Disunting oleh Edi dan Amirudin Rohani. Cet. 1. Wonosobo: UNSIQ Press.
- Umairah, Saidati Jannati. 2023. "Pendidikan Islam Transformatif dalam Kurikulum Merdeka Belajar Era." *at-Tarbiyah al-Mustamirah: Jurnal Pendidikan Islam* 4 (2). <https://doi.org/10.31958/atjpi.v4i2.10592>.
- Umar, Umar. 2016. "Eksistensi Pendidikan Islam di Indonesia (Perspektif Sejarah Pendidikan Nasional)." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19 (1). <https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n1a2>.
- Wahid, Abdurrahman. 1983. *Muslim di Tengah Pergumulan*. Cet. 2. Jakarta: Leppenas.
- Wahid, KH. Abdurrahman. 2010. *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*. Cet. 3. Yogyakarta: LKiS.
- Yahdi, Muhammad. 2023. "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kreatif* 4 (1). <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i1.39183>.